

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
TANPA PERJANJIAN PRA-NIKAH PASCA PERCERAIAN  
BERDASARKAN PUTUSAN NO 108/PDT.G/2021.PN.SGR**

**Oleh**

**Ni Komang Intan Kumala Sari, NIM 2014101016**

**Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan**

**ABSTRAK**

Fenomena budaya patriarki masih sering dapat kita jumpai di tengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini diakibatkan oleh kepercayaan masyarakat bahwa laki-laki lebih diutamakan karena merupakan penerus garis keturunan. Dalam kasus ini, penulis mencoba untuk meneliti kasus perkara di Pengadilan Negeri Singaraja tentang nafkah serta harta bersama yang belum dibagikan. Dalam keputusan final, proporsi harta bersama lebih banyak diperoleh pihak laki-laki akibat tiadanya perjanjian pra-nikah yang mengatur tentang ketentuan pembagian harta perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan serta mengetahui bagaimana upaya penyelesaian hakim dalam mempertimbangkan keputusan membagi harta bersama tanpa perjanjian pra-nikah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli untuk membuat perjanjian pra-nikah sebelum perkawinan dilangsungkan agar kepentingan kedua elah pihak dapat terakomodasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif serta menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, serta pendekatan konseptual.

**Kata Kunci : Harta Bersama, Perjanjian Pra-Nikah, Perceraian**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
TANPA PERJANJIAN PRA-NIKAH PASCA PERCERAIAN  
BERDASARKAN PUTUSAN NO 108/PDT.G/2021.PN.SGR**

**Oleh**

**Ni Komang Intan Kumala Sari, NIM 2014101016**

**Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan**

***ABSTRACT***

The phenomenon of patriarchal culture is still frequently encountered in the midst of community life. This is due to the societal belief that men are prioritized because they are the heirs of lineage. In this case, the author attempts to examine a legal case at the Singaraja District Court concerning alimony and undivided shared property. In the final decision, a larger proportion of the shared property is obtained by the male party due to the absence of a prenuptial agreement that regulates the terms of marital property division. The purpose of this research is to analyze court decisions and understand how judges consider dividing shared property without a prenuptial agreement based on the Civil Code, Law Number 16 of 2019 regarding changes to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Additionally, it aims to encourage society to be more mindful of creating prenuptial agreements before marriage to ensure the interests of both parties are accommodated. The research methodology employed in this study is a normative juridical approach, utilizing three types of approaches: case analysis, legal provisions, and conceptual analysis.

**Keywords : Shared Property, Prenuptial Agreement, Divorce**

